

PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS E-PLANNING DI BAPPEDA PROVINSI DIY

Sholeh Jamaluddin, Kushandajani, Laila Kholid Alfirdaus
Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Innovation and the use of information and communication technology are requirements to make planning go in a better direction. The Government of Yogyakarta Special Region in terms of development planning applies the principle of e-government by implementing electronic-based planning. This innovation is realized with supporting applications in the form of JogjaPlan and SIPD which help the planning process in the region. This research aims to find out and analyze the obstacles and strategies in the implementation of the E-Planning system at the Regional Planning and Development Agency of Yogyakarta Province. This research uses descriptive qualitative methods and data collection techniques through interviews and observations. The results of this study indicate that the implementation of e-planning has benefits in the form of maintaining the consistency of development planning, making the planning process run quickly and on time, integrating planning databases, and opening opportunities for community participation. But on the other hand, there are still obstacles in the form of employee shifts that can have an impact on employee abilities, the level of community participation through JogjaPlan is still minimal, there is no maximum integration between JogjaPlan and SIPD, the responsiveness of the application server is not stable, and the utilization of Geographic Information Systems (GIS) is not maximized. With these obstacles, strategies can be taken in the form of increasing employee capacity building through competency training, increasing socialization in the community, strengthening application servers, and integrating data between JogjaPlan and SIPD applications.

Keywords: Innovation, E-Government, Development Planning, E-Planning

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan sebagai bagian dari tugas pemerintah daerah merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai unsur pemangku kebijakan dan mencakup serangkaian kegiatan. Tujuan dari

perencanaan pembangunan adalah untuk mencapai sasaran pembangunan di tingkat regional dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau kemudian disingkat Bappeda memiliki peran yang

signifikan dalam proses perencanaan daerah. Bappeda merupakan salah satu dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di pemerintah daerah dan memiliki fungsi sebagai penunjang pemerintah di bidang perencanaan pembangunan.

Satuan kerja yang mempunyai tupoksi dalam bidang perencanaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ialah Bappeda DIY. Pelibatan institusi lain maupun dengan masyarakat pada daerah ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam melaksanakan proses perencanaan pembangunan. Partisipasi yang aktif ini menjadi pedoman untuk menciptakan dokumen perencanaan pembangunan yang terbagi menjadi beberapa jangka waktu, yaitu jangka panjang, menengah, dan tahunan. Jika dilihat dari proses yang kompleks tidak jarang ditemukan berbagai faktor penghambat ataupun faktor pendukung keberjalanan fungsi perencanaan pembangunan di DIY.

Pada era sekarang ini kegiatan pemerintahan tidak bisa terlepas dengan keberadaan perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan ini tentunya melahirkan inovasi-inovasi baru yang dilakukan oleh pemerintah demi mewujudkan bentuk efektif penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya pengadopsian

teknologi dan informasi ini berdampak besar dan bermanfaat bagi pelayanan kepada masyarakat secara luas. Pemanfaatan teknologi ini sejalan dengan sistem pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan dengan jaminan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar instansi pemerintah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ini mengindikasikan bahwa penerapan model *electronic government* atau *e-government* menjadi sebuah perhatian khusus oleh pemerintah.

Begitupun dalam bidang perencanaan pembangunan yang menjadi salah satu tugas pemerintah. Inovasi dan penerapan teknologi merupakan prasyarat bagi perencanaan yang lebih efektif. Saat ini, terjadi peningkatan signifikan dalam penggunaan teknologi ini. Pemerintah daerah juga dituntut untuk secara aktif merumuskan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, akuntabel, serta transparan. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal perencanaan pembangunan menerapkan prinsip *e-government* dengan menerapkan perencanaan berbasis *e-planning*. Inovasi ini dituangkan dalam bentuk aplikasi penunjang yang membantu proses perencanaan di daerah.

E-planning adalah aplikasi sistem informasi yang digunakan dalam proses

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penggunaan e-planning menjadi sangat penting dalam tahapan perencanaan mengingat seringkali dihadapkan pada ketidakkonsistenan antara pengelolaan APBD dengan tujuan yang akan dicapai. Teknologi ini diterapkan dengan tujuan meningkatkan mutu layanan masyarakat serta mempermudah koordinasi di antara lembaga pemerintahan., serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam manajemen penyelenggaraan pemerintah (Nuravita,2017).

Inovasi yang diadopsi oleh Bappeda DIY dalam perencanaan pembangunan ini salah satunya adalah aplikasi pembuatan JogjaPlan dan penggunaan SIPD. JogjaPlan, sebuah aplikasi yang telah dikembangkan sejak tahun 2010, dapat diakses melalui situs web sebagai sarana untuk membantu dalam penyusunan RKPD, KUA/PPAS, KUA/PPAS Perubahan, serta RKPD Perubahan tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi. Sampai sekarang sudah mengalami berbagai penyempurnaan bentuk. Keterlibatan masyarakat pun juga menjadi perhatian. Bagaimana masyarakat menjadi mudah untuk melihat, mengakses, dan mengikuti proses pembangunan di DIY. Mereka juga dapat menyampaikan aspirasi

mereka melalui fitur-fitur yang tersedia di situs web tersebut (Kamim,2018).

Selain JogjaPlan, Bappeda DIY dalam menjalankan pemerintahan berbasis elektronik ini menyediakan beberapa fitur antara lain dataku, geoportal, dan E-Monev. Dataku merupakan aplikasi penyedia sumber data dan menyediakan layanan informasi kajian yang dibuat oleh pemerintah daerah. Data ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun akademisi sebagai referensi untuk pengambilan keputusan ataupun penelitian. Kemudian Geoportal adalah aplikasi yang menyediakan informasi terkait data spasial dengan tujuan membangun single base map. Dengan aplikasi ini, masyarakat, instansi, akademisi dapat memanfaatkan data tanpa khawatir tentang keaslian dan keakuratan data. Kemudian terdapat aplikasi E-Monev sebagai upaya pengkorelasi antara desain perencanaan dengan target pencapaian yang baik.

Bappeda dalam menerapkan perencanaan berbasis elektronik ini mempunyai posisi yang sangat penting. Bappeda melakukan koordinasi dengan institusi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lain untuk membuat sebuah dokumen perencanaan yang terpadu. Keberadaan penyajian data dan informasi yang

mendukung ini dapat berfungsi sebagai indikator yang baik dalam mengawasi proses perencanaan. Aplikasi ini diharapkan dapat menjaga transparansi anggaran sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu bukan hanya mengawasi tetapi juga dapat memberi masukan. Melalui digitalisasi perencanaan ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk turut serta dalam mengawasi potensi pelanggaran terhadap penggunaan anggaran pembangunan.

Secara keberjalanannya aplikasi ini memang berjalan dengan optimal. Buktinya berbagai penghargaan ataupun prestasi telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi DIY melalui aplikasi JogjaPlan ini. Penghargaan juara 1 Pangripta Nusantara Utama Tahun 2017 diberikan kepada JogjaPlan sebagai pengakuan atas praktik perencanaan daerah yang unggul. Selain itu, pada tahun 2015, JogjaPlan berhasil masuk dalam daftar 25 inovasi layanan publik terbaik secara nasional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). JogjaPlan juga berhasil menjadi terbaik III dalam kategori inovasi pelayanan publik tingkat provinsi se-Indonesia (Astuti, 2015).

Akan tetapi dalam proses keberjalanannya yang selalu diadakan perubahan tidak terlepas dengan faktor yang

menjadi penghambat. Tentunya faktor-faktor penghambat ini harus diidentifikasi dan dilakukan sebuah evaluasi resmi apakah memang implementasi perencanaan pembangunan berbasis e-planning telah berjalan dengan lancar dan berhasil. Bagaimana ketersediaan sumber daya serta kepemimpinan dalam menjalankan tugas perencanaan ini. Di sisi lain keterlibatan secara aktif berbagai aktor juga harus menjadi fokus perhatian. Penerapan e-planning ini dapat memberikan banyak manfaat jika hambatan-hambatan ini dikelola dengan baik dan strategi yang tepat diterapkan.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini, peneliti akan menggali data untuk mendapatkan temuan penelitian yang komprehensif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara bersama para informan dan observasi. Situs penelitian dalam studi ini dilakukan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya yaitu di Jl. Malioboro,

Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Perencanaan Pembangunan Berbasis E-Plannning

Sumber daya manusia yang baik dapat menggerakkan berbagai sumber daya dalam organisasi. Terdapat berbagai cara untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan, baik manajerial maupun teknis fungsional. Dengan demikian, pengembangan SDM sangat penting untuk memastikan bahwa kompetensi pegawai sesuai dengan kompetensi pekerjaan yang diberikan kepada mereka.

SDM perencana menjadi salah satu faktor penting yang berperan dalam mewujudkan tujuan organisasi. Pegawai yang berkualitas dan professional dapat diharapkan mampu menjamin dan mempercepat pencapaian dari tujuan dan fungsi Lembaga. Lebih jauhnya SDM yang bagus menjadi ciri dari implementasi good governance. Apalagi dalam penerapan e-plannning yang merupakan bentuk dari implementasi pemerintahan dengan berbasis teknologi dan informasi (IT) diperlukan kemampuan lebih untuk dapat mengelolanya dengan baik.

Dalam perencanaan pembangunan berbasis e-planning sendiri dapat diampu oleh semua pegawai di Bappeda. Bidang yang menjadi pengampu JogjaPlan di Bappeda adalah bidang perencanaan. Kemudian untuk pengampu di OPD terdapat pegawai yang ditujuk sebagai operator. Setiap bidang di bappeda mengampu mitra-mitra OPD yang sudah terbagi sedemikian rupa. Dengan demikian terdapat pembagian kerja yang jelas dengan OPD-OPD yang ada di pemerintahan DIY.

Kemudian sistem perencanaan berhubungan erat dengan aturan maupun kebijakan yang digunakan oleh suatu daerah tertentu sebagai dasar/landasan pelaksanaan perencanaan pembangunan. Hal ini bisa dijabarkan dengan indikator prosedur, mekanisme pelaksanaan, pengambilan keputusan, pengesahan, dan sebagainya. Sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah, menegaskan agar pemerintah daerah pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota wajib untuk menggunakan aplikasi perencanaan untuk memaksimalkan kinerja pemerintah daerah. Sistem perencanaan dalam e-planning dapat mencakup apa saja yang terdapat di dalam aplikasi itu sendiri. Konten dari aplikasi menjadi hal penting dalam keberjalanan perencanaan pembangunan. Selaras dengan pendapat dari Indrajit (2005:18) dalam skripsi Aryanto (2015) mengemukakan bahwa Content Development merupakan aspek pembaharuan aplikasi terhadap perangkat lunak, dapat dalam bahasa dalam pemerograman, standar teknis pada aplikasi, spesifikasi sistem berbasis data, user interface yang diterapkan.

Hal yang tidak kalah penting adalah Teknologi Informasi dapat menjadi aspek yang penting dalam proses kebijakan perencanaan pembangunan berbasis e-planning. Penerapan E-Planning ini membutuhkan dukungan teknologi bukan hanya dari segi sarana dan prasarana berupa peralatan yang memadai akan tetapi dibutuhkan manajemen pengelolaan sistem yang baik untuk memastikan bahwa sistem bisa berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan.

Infrastruktur IT, hal ini berhubungan dengan sarana dan prasarana yang diperlukan yang terbagai menjadi komponen perangkat keras (hardwere) dan perangkat lunak (softwere). Ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai dengan spesifikasi dan relevan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam perencanaan. Dengan adanya dukungan infrastruktur teknologi ini maka penerapan e-planning dapat berjalan dengan baik. Bappeda DIY telah menyediakan jaringan internet yang baik sehingga dapat memperlancar proses keberjalanan e-planning yang sangat bergantung pada jaringan internet.

Jaringan internet yang ada di Bappeda DIY dikelola langsung oleh Diskomnfo DIY. Sarana dan prasarana yang baik ini sangat mendukung dengan keberjalanan E-Planning mengingat aplikasi ini tidak dapat berjalan dengan baik. Apabila terjadi troublesshoting dari jaringan ataupun infrastrukturnya Bappeda dapat menghubungi kepada bagian program untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Diskominfo. Kerja sama yang baik ini juga dilakukan apabila dalam acara tertentu membutuhkan kapasitas internet yang lebih tinggi, maka Diskominfo dapat melakukan pengaturan jaringan sesuai

denga napa yang dibutuhkan oleh kegiatan tersebut.

Bappeda DIY menggunakan domain dari provinsi yaitu melalui portal <http://jogjaplan.jogjaprovo.go.id/>. Domain ini menjadi domain wilayah dari pemerintah daerah Provinsi DIY. Dari domain tersebut kemudian dipantau juga oleh Diskominfo DIY. Mengingat terdapat berbagai ancaman keamanan data yang perlu diperhatikan, Diskominfo sendiri setiap tahunnya melakukan pengecekan dari keamanan, jadi kemarin pun JogjaPlan diminta untuk mengubah database untuk keamanan dan mencegah ancaman data ataupun serangan dari pihak luar.

2. Hambatan Penerapan E-Planning

Kemampuan SDM dalam suatu bidang tentu tidak merata. Adanya pergeseran SDM (mutasi) menjadikan pegawai yang tadinya memiliki kemampuan karena pengalaman kerja digantikan oleh pegawai baru yang belum mempunyai kapasitas. Penggantian atau pemindahan dapat menjadi masalah bagi kinerja di pemerintahan daerah. Dalam hal ini, momen yang paling penting adalah perpindahan kekuasaan dari pejabat lama ke pejabat baru. Tidak diragukan lagi, pergantian pegawai di suatu organisasi seringkali berdampak pada kemampuan pegawai dalam bidang yang baru.

Dalam hal partisipasi kepada masyarakat, JogjaPlan telah menyediakan fitur bagi masyarakat untuk memberikan aspirasi ataupun masukan kepada pemerintah daerah. Masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya melalui fitur ini. Walaupun Bappeda telah menyediakan fitur ini, namun angka partisipasi masyarakat cenderung masih minim dan rendah. Hal ini dapat dilihat dari kuantitas jumlah usulan masyarakat yang masuk melalui form usulan masyarakat di JogjaPlan.

Faktanya data terakhir yang peneliti dapatkan tentang jumlah partisipasi pada form usulan masyarakat adalah pada tahun 2022. Hal ini terjadi karena pergeseran fokus aplikasi ke SIPD yang dibuat oleh pusat. Jumlah terakhir usulan yang masuk pada tahun ini tidak dapat diketahui. Ini menunjukkan bahwa form usulan masyarakat di JogjaPlan sejak adanya SIPD tidak menjadi konsen yang prioritas dari Bappeda DIY. Dari data tersebut terdapat tanggapan atas usulan yang masuk dengan rincian sebagai berikut.

Aplikasi perencanaan yang digunakan oleh Bappeda DIY ialah SIPD dan JogjaPlan sebagai aplikasi pendukung. Dalam keberjalannya kedua aplikasi ini memegang peran penting dan harus digunakan keduanya. Pada akhirnya dalam menginput

atau mengantri data perencanaan seringkali terjadi double entry yang harus dilakukan oleh OPD di DIY. Alasan mengapa Bappeda tetap menggunakan JogjaPlan dan tidak menggunakan aplikasi SIPD saja ialah fitur yang disediakan lebih kompleks dan mengakomodir kebutuhan perencanaan daerah. Terdapat indikator yang ditawarkan dalam aplikasi JogjaPlan.

Aplikasi e-planning dalam keberjalannya memanfaatkan jaringan internet yang mana harus didukung dengan sistem server yang baik. Hambatan yang ditemukan terkait dengan responsifitas aplikasi ialah sering terjadinya server down SIPD ketika digunakan dalam traffic yang padat. Mengingat aplikasi SIPD digunakan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Berbeda dengan aplikasi JogjaPlan yang dapat dikatakan lebih stabil karena dikelola oleh Bappeda DIY. Pun jika terjadi gangguan pada SIPD, Bappeda harus menyampaikan ke pusat terlebih dahulu untuk kemudian bisa ditanggapi.

SIG menjadi elemen penting berkaitan dengan data dalam perencanaan pembangunan. SIG memiliki kemampuan untuk menangani data berefrensi geografis. Kemampuan ini mencakup pemasukan, pengelolaan atau manajemen data (termasuk penyimpanan dan pengaktifan kembali),

manipulasi, analisis, dan keluaran data. Selain itu, SIG juga merupakan alat bantu manajemen berupa informasi komputer yang terkait erat dengan sistem pemetaan dan analisis segala sesuatu dan peristiwa yang terjadi di suatu wilayah.

Peran Bappeda di dalam pemanfaatan data informasi geografis ini terdapat unit pelaksana teknis (UPT) yang secara khusus menangani bidang ini yaitu Badan Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah (BPPSD). BPPSD melakukan pengumpulan data bersama aktor-aktor lain sebagai produsen data termasuk OPD di daerah yang kemudian divisualisasi ke dalam format spasial. Setelah menjadi data yang final kemudian dilakukan publikasi melalui sistem yang bernama Geoportal DIY. Data yang sudah berada dalam Geoportal ini bisa dimanfaatkan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat secara umum.

Lalu Implementasi Sistem Informasi Geografis di Bappeda DIY belum dilakukan secara optimal. Kualitas perencanaan akan meningkat seiring dengan peningkatan ketersediaan data baik berupa data statistik maupun spasial. Mengingat dalam mengidentifikasi masalah ataupun menentukan program pembangunan harus berdasarkan dengan data spasial yang lebih

mendalam agar sesuai sasaran. DIY merupakan satu-satunya daerah yang pengelolaan datanya ada di Bappeda. Jika di daerah lain ada penegelolaanya ada di Diskominfo. Penempatan data tersebut sebagai satu hal yang crucial dalam mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis data.

3. Strategi dalam mengatasi hambatan E-Planning

Salah satu upaya untuk meningkatkan karier karyawan adalah mutasi di lingkungan kerja pemerinthan. Ini mencakup pemindahan karyawan ke posisi yang lebih sesuai dengan pekerjaan mereka, meningkatkan produktivitas kerja, dan meningkatkan prestasi. Menurut Peraturan BKN RI Nomor 5 Tahun 2019, mutasi dilakukan untuk menyesuaikan kompetensi ASN dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, dan pola karier, dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi. Namun yang menjadi hambatan ialah unsur subjektifitas dalam menilai kinerja dan perilaku pegawai. Mutasi pegawai yang didasarkan dengan unsur subjektifitas ini dapat menyebabkan ketidakaturan dalam sistem pemerintahan dan kompetensi pegawa yang diharapkan tidak sesuai denga tugas dan fungsi bidang.

Strategi Bappeda dalam menyikapi adanya pergerseran pegawai ini adalah dengan melakukan capacity building, melalui pelatihan kompetensi kerja. Pembangunan kapasitas pegawai ini dilakukan melalui pelatihan pegawai Bappeda dengan tujuan untuk meningkatkan kapasistas dari pengetahuan dan keterampilan (skills), sikap (attitude), dan perilaku (behaviour) aparat pemerintahan. Pelatihan dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek) dilakukan oleh Bappeda untuk menunjang kinerja pegawai tertuma dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan berbasis e-planning dengan memanfaatkan JogjaPlan dan SIPD. Bappeda DIY juga selalu terbuka ketika OPD menanyakan bagaimana teknis dalam menjalankan E-Planning dalam perencanaan pembangunan.

Pelatihan bimbingan teknis ini bukan hanya dilakuakan kepada pegawai Bappeda melainkan pegawai OPD-OPD yang menjadi mitra dalam perencanaan daerah. Pelatihan kerja sebagai bentuk untuk meningkatkan kemampuan kinerja. Pelatihan mempersiapkan pegawai untuk mengikuti jalur sesuai dengan instruksi dar organisasi tempat bertugas sehingga mampu menjalankan tupoksi mereka dengan tepat. Bimbingan teknis juga memungkinkan

untuk meningkatkan prestasi dan pencapaian pegawai terutama dalam hal pemahaman dan ketrampilan.

Strategi yang dilakukan oleh Bappeda ialah dengan cepat menanggapi dinamika perubahan kebijakan maupun adanya penyesuaian dengan kondisi lingkungan sehingga sistem perencanaan mampu mengikuti dengan perkembangan zaman.

Sebagai contoh perubahan kebijakan di dalam perencanaan adalah dengan adanya mandat UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan wajib bagi pemerintah daerah menggunakan aplikasi SIPD dari Kemendagri untuk menjalankan proses perencanaan daerah. Hal ini pun ditanggapi dan disesuaikan dengan pemanfaatan aplikasi JogjaPlan yang lebih dulu digunakan oleh pemerintah DIY. Kemudian JogjaPlan juga menyesuaikan dengan dinamika- dalam proses perencanaan, baik dari setiap tahap proses perencanaan (rancangan awal, rancangan, rancangan akhir, sampai penetapan). JogjaPlan sempat melakukan update fitur penyusunan dokumen melakukan penyusunan dokumen Perencanaan Menengah Antara yang menyesuaikan dengan proses perencanaan dan kebutuhan proses perencanaan.

Strategi yang dilakukan Bappeda DIY ialah adanya sosialisasi yang masif kepada masyarakat dalam forum-forum perencanaan daerah. Tujuan sosialisasi ini ialah agar masyarakat menjadi tahu terdapat mekanisme yang mudah untuk menyampaikan aspirasi melalui JogjaPlan. Kemudian sosialisasi ini juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan platform media social agar menjadi lebih masif dan dapat diketahui lebih banyak orang.

Adapun strategi yang dapat dilakukan ialah dengan adanya integrasi data antara SIPD dan JogjaPlan. Pengembangan fitur aplikasi yang memungkinkan integrasi antara SIPD dan JogjaPlan perlu dilakukan dengan database mirror. Namun dalam praktiknya data dari SIPD bisa digunakan untuk data ke JogjaPlan akan tetapi memerlukan izin yang kompleks dan dalam pelaksanaannya mempunyai keterbatasan dalam memperoleh perizinan.

Belum optimalnya pemanfaatan data berbasis SIG diperlukan sebuah pengembangan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Pada dasarnya, pengembangan SIG terdiri dari banyak elemen yang saling terkait, seperti siklus kegiatan SIG, yang dimulai dengan pengumpulan data, kemudian proses input data, analisis, dan manipulasi melalui media

komputer, dan akhirnya, produk SIG digunakan oleh pengguna dan diterapkan di dunia nyata. Sumber daya manusia, data, dan informasi, serta perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) adalah komponen yang perlu diperhatikan agar pengembangan SIG dapat dilakukan.

Secara umum data yang tersedia pada aplikasi Geoportal sudah cukup banyak variasi, namun dalam pemanfaatannya masih belum optimal terutama pada bagaimana proses perencanaan pembangunan berdasarkan data yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Geospasial (SIG) ini.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Bappeda Provinsi DIY telah memanfaatkan E-Planning sebagai upaya melakukan perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik dengan menggunakan alat bantu berupa aplikasi JogjaPlan dan SIPD. Dengan penerapan E-Planning ini memberikan manfaat berupa menjaga konsistensi perencanaan pembangunan, menjadikan proses perencanaan dapat berjalan cepat dan tepat waktu, mengintegrasikan database perencanaan, membuka kesempatan partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan

GIS guna membangun perencanaan berbasis kewilayahan.

Terdapat beberapa hambatan dalam penerapan E-Planning di Bappeda DIY diantaranya adanya pergeseran pegawai yang dapat berdampak pada kemampuan pegawai dalam melaksanakan E-Planning, dinamika perubahan kebijakan di dalam perencanaan, tingkat partisipasi masyarakat melalui JogjaPlan yang masih minim, belum adanya integrasi yang maksimal antara JogjaPlan dan SIPD, responsifitas server aplikasi yang masih sering down, dan belum maksimalnya pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG).

Dengan adanya hambatan tersebut, Bappeda DIY melakukan upaya dan strategi berupa melakukan capacity building berupa pelatihan kompetensi kerja terkait dengan E-Planning, responsif terhadap dinamika perubahan kebijakan perencanaan pembangunan, melakukan sosialisasi yang massif kepada masyarakat dalam forum OPD, melakukan pengajuan mirroring data untuk integrasi data perencanaan pusat dan daerah, mengoptimalkan pemanfaatan SIG dalam kerangka perencanaan berbasis kewilayahan.

2. Saran

A. Perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat

dalam proses perencanaan melalui aplikasi E-Planning. Upaya ini dapat dilakukan melalui sosialisasi yang masif kepada masyarakat tidak hanya dalam forum OPD, melainkan dengan memanfaatkan platform media terkini yang menjangkau masyarakat lebih luas.

B. Perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa kedua sistem JogjaPlan dan SIPD dapat beroperasi secara sinergis guna mendukung efisiensi dan efektivitas perencanaan di Bappeda DIY.

C. Peningkatan infrastruktur teknologi dan pemeliharaan server secara berkala menjadi kunci untuk menjaga ketersediaan layanan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, L. (1999). Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPF.

Comptroller's Handbook. (1995). Management Information System. Comptroller of the Currency Administrator of National Bank.

Creswell, J. W. (2013). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Indrajit, & Eko, R. (2002). Electronic Government : Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik

Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Andi.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. CA: SAGE Publications.

Muhadjir, N. (1996). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rakesarasin.

Nuravita, W. (2017). Penerapan E-Planning dalam Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan Pembangunan Daerah. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya.

Prihatin, S. D., Daryanti, S., & Pramadha, R. A. (2019). Aplikasi Teori Perencanaan : Dari Konsep Ke Realita. Yogyakarta: CV. Buana Grafika.

Riyadi, & Baratakusumah, D. (2003). Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sitokdana, M. N. (2015). Evaluasi Implementasi eGovernment Pada Situs Web Pemerintah Kota Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makassar dan Jayapura.

Sudibyo, P. (1999). Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Universitas Terbuka.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Yong, S. J. (2003). *E-Government in Asia*. Singapore: Times Editions.

Dedi Juniawan A. (2019). Sistem Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Melalui Penerapan E-Planning (Studi Kasus pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(3), 285–293.

Fahzura, L. (2020). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Social and Policy Issue*, 2020. 1-8.

Farid, M. (2015). Implementasi electronic government melalui surabaya single window di unit pelayanan terpadu satu atap kota surabaya. *Publika*, 3(5).

Juniawan, Wayan Dodi. 2019, Sistem Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Melalui Penerapan E-Planning (Studi Kasus pada Bappeda Litbang Kabupaten Gianyar). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* Vol.5, No.3

Kamim, A. B., Khandiq, M., & Amal, I. (2018). *JogjaPlan dan Kelompok Warga Pengawal Anggaran dalam Perencanaan Pembangunan di Daerah Istimewa*

Yogyakarta. *Jurnal Pemikiran Sosiologis*, V, 27-53.

Mait, A. S., Lumolos, J., & Monintja, D. (2020). Analisis Penerapan Sistem E-Planning Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulut). *Jurnal Eksekutif*, II, 1-11.

Miyanto, F. (2017). Efektivitas Penerapan Website Jogjaplan.com Pada Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Public Policy and Administration*, VI, 705-716.

Sari, D. N. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Bappeda Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 4(4), 242–248. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i4.373>

Tumija, T., & Erlambang, P. A. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Birokrasi*, 155–169. <https://doi.org/10.33701/jmb.v5i2.3696>